



# AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

## PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, DAN PEMANFAATAN E-SBN RITEL ONLINE TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

Intan Gita Pancaningrum<sup>1\*</sup>  
Sri Ayem<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
\*email: [sriayemfeust@gmail.com](mailto:sriayemfeust@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to determine the effect of budget goal clarity, control of accounting, reporting systems and the use of online retail E-Business the performance accountability of government agencies Purworejo District. The population of this study is the Working Device Unit (SKPD) consisting of 14 agencies in Purworejo District. The sample is selected through the method of purposive sampling. Methods of data collection using questionnaires. Testing data is done with the test of validity, reliability test, while hypothesis test with multiple linear regression analysis with the help of software SPSS version 17.0.*

*The results of this study indicate that (1) budget goal clarity affects the performance accountability of government agencies (2) control of accounting affects the performance accountability of government agencies, (3) reporting systems affects the performance accountability of government agencies, (4) the use of online retail E-Business has no signifikan the performance accountability of government agencies.*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 2020-09-01  
Direview: 2020-11-02  
Disetujui: 2020-12-15  
Terbit: 2021-01-26

### Keyword:

*Budget Goal Clarity; Control Of Accounting; Reporting Systems; The Adherence Of The Law Regulation And E-SBN Ritel Online; Performance Accountability*

### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan tuntutan akuntabilitas atas lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan secara strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Salah satu tujuan dari sektor publik yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang baik dan merata. Penilaian kinerja organisasi sektor publik sangat penting dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrayani, Diatmika, & Wahyuni, 2017). Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good village governance*) menjadi tuntutan masyarakat untuk pemerintah daerah dalam menyajikan laporan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah suatu

pertanggungjawaban pemerintah untuk membuat, menyampaikan, dan juga melaporkan sebagaimana pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (Erawati & Yafandi, 2018).

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam konteks pemerintah, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat/publik) dan vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Anggaran adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang akan dicapai selama satu periode waktu tertentu yang diukur dalam bentuk finansial. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang telah mereka buat. Kejelasan sasaran anggaran yang jelas dapat membantu kepala SKPD dalam menjalankan fungsi dari anggaran dan pengendalian sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik (Agustin, 2018). Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting dilingkup pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Zakiyudin & Suyanto, 2015). Sehingga, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka, memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai organisasi (Harahap, 2018). Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi, pengendalian tersebut dapat juga disebut sebagai pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Setyawan, 2017). Tujuan informasi pengendalian akuntansi untuk pemakainya adalah untuk meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat (Fauzan, 2017).

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Indrayani et al., 2017). Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hartanto, 2019) tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu tempat penelitian dan mengganti variabel independennya ketaatan peraturan perundang-undangan menjadi pemanfaatan E-SBN ritel online. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan E-SBN ritel online terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Purworejo)”

## Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Sardi, Rifa'i, & Husna, 2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan prinsipal. Pada dasarnya teori keagenan merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Dupe, 2019).

### *Theory Stewardship*

Donaldson, Lex., Davis, 1989) mendefinisikan Stewardship theory sebagai situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuantujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini ialah mampu menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai lembaga yang mampu manampung aspirasi masyarakat, dapat dipercaya, dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat dan bertanggungjawab atas keuangan yang sudah diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi dan kesehtraaan sosial bisa tercapai (Dupe, 2019).

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Fauzan, 2017). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, sehingga semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja instansi pemerintah (Setyawan, 2017). Kurangnya kejelasan sasaran anggaran menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana yang berakibat pada penurunan kinerja (Putri, 2017). Sehingga, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas memudahkan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran akan berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun sebaliknya jika sasaran anggaran tidak jelas menyebabkan dalam pelaksanaan suatu anggaran akan mejadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam pekerjaannya (Dupe, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hartanto (2019) dan Agustin (2018) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dihasilkan oleh (Laksana & Handayani, 2014) dan (Silalahi, 2017) kejelasan sasaran anggaran secara parsipal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

**H<sub>1</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

### **Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengendalian akuntansi adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat trasaksi keuangan serta memastikan keandalan catatan keuangan (Setyawan,2017). Penggunaan sistem pengendalian akuntansi dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan kegiatan dan kinerja organisasi (Putri, 2017). Menurut (Fauzan, 2017) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggungjawab yang dilakukan. Oleh karena itu, semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat (Suhaesti, 2016).

Hasil ini sejalan dengan (Fauzan, 2017) dan (Agustin, 2018) dalam penelitian ini menunjukkan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahid, 2016) dan (Putra, 2016) pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerinta.

**H<sub>2</sub>: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

### **Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Sistem pelaporan merupakan suatu proses pengumpulan dan pengelolaan untuk penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

(SAP) yang mampu menyajikan informasi yang dapat diuji dan mudah dipahami (Agustin, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Agustin, 2018), (Fauzan, 2017), dan (Hartanto, 2019) bahwa sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**H<sub>3</sub> : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

### **Pengaruh Pemanfaatan E-SBN Ritel Online Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

*E-SBN ritel online* adalah aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapat daerah, dengan adanya *e-sbn ritel online* memudahkan para investor untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan begitu mampu meminimalisir pembayaran hutang. *E-SBN ritel online* merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan dan mengemban amanah sebagai tanggungjawab mensejahterakan masyarakat (Risda, 2019). Pemanfaatan teknologi sangatlah penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Hal sesuai dengan TAM yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja (Chintya, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan (Nurlaili, 2016) dan (Damayanti, 2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2018) bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risda, 2019) bahwa pemanfaatan E-SBN ritel online tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**H<sub>4</sub>: Pemanfaatan E-SBN Ritel Online Berpengaruh Positif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data, Populasi, dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang bekerja di setiap SKPD Pemerintah Kota Purworejo, sampel penelitian adalah pegawai keuangan di setiap SKPD Pemerintah Kota Purworejo. Dari populasi tersebut, peneliti akan menggunakan pengambilan sampel *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kuesioner yang disebar atau dibagikan secara langsung kepada Pejabat bagian keuangan yang bekerja di setiap SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Purworejo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	70	25	50	40.31	4.432
Pengendalian Akuntansi	70	18	40	32.03	5.616
Sistem Pelaporan	70	18	40	31.99	4.598
Pemanfaatan E-SBN Ritel Online	70	18	50	36.69	7.300
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	19	40	32.59	4.172
Valid N (listwise)	70				

**Sumber: Data diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki rata-rata sebesar 40,31 dengan *standar deviation* 4,432. Variabel pengendalian akuntansi memiliki rata-rata sebesar 32,03 dengan *standar deviation* sebesar 5,616. Variabel sistem pelaporan memiliki rata-rata sebesar 31,99 dengan *standar deviation* sebesar 4,598. Variabel pemanfaatan E-SBN Ritel Online dengan rata-rata 36,69 dengan *standar deviation* sebesar 4,172 dan untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki rata-rata sebesar 32,59 dengan *standar deviation* sebesar 4,173.

**UJI ASUMSI KLASIK**

**Uji Normalitas**

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28132697
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.043
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.662
Asymp. Sig. (2-tailed)		.774

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Sumber: Data diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 2 tersebut, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,662 dan nilai signifikansi sebesar 0,774 yang artinya lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05.

**Uji Multikolonieritas**

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.346	2.661		1.258	.213		
Kejelasan Sasaran Anggaran	.228	.095	.242	2.387	.020	.448	2.232
Pengendalian Akuntansi	.270	.069	.363	3.908	.000	.532	1.879
Sistem Pelaporan	.267	.083	.295	3.240	.002	.556	1.800
Pemanfaatan E-SBN Ritel Online	.078	.043	.136	1.810	.075	.810	1.234

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Sumber: Data diolah, 2019**

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa penelitian ini terbebas dari masalah multikolonieritas. Hal ini sesuai dengan ketentuan yaitu dengan nilai *tolerance* > 0.01 dan VIF < 10, terbukti dengan variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,448 > 0.10 dan

nilai VIF sebesar  $2,232 < 10$ . Pengendalian akuntansi memiliki nilai *tolerance* sebesar  $0,532 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,879 < 10$ . Sistem Pelaporan memiliki nilai *tolerance* sebesar  $0,556 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,800 < 10$ . Nilai *tolerance* sebesar  $0,810 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,234 < 10$  yang dimiliki oleh pemanfaatan E-SBN ritel online.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.702	1.705		1.585	.118
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.040	.061	-.121	-.661	.511
	Pengendalian Akuntansi	.012	.044	.044	.260	.796
	Sistem Pelaporan	-.026	.053	-.079	-.483	.631
	Pemanfaatan E-SBN Ritel Online	.030	.028	.147	1.084	.283

a. Dependent Variable: AbsRes\_1

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini lolos dari uji heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan berada di atas 0,05, terbukti dengan variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,511, pengendalian akuntansi sebesar 0,796, sistem pelaporan sebesar 0,631, dan pemanfaatan E-SBN ritel online sebesar 0,283 yang berarti hasil signifikansinya lebih besar dari 0,05.

**Analisis Data**

**Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	841.878	4	210.470	38.096	.000 <sup>a</sup>
	Residual	359.107	65	5.525		
	Total	1200.986	69			

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan E-SBN Ritel Online, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah, 2019

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,346	2,661		1,258	,213
Kejelasan Sasaran Anggaran	,228	,095	,242	2,387	,020
Pengendalian Akuntansi	,270	,069	,363	3,908	,000
Sistem Pelaporan	,267	,083	,295	3,240	,002
Pemanfaatan E-SBN Ritel Online	,078	,043	,136	1,810	,075

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat hasil uji parsial (uji t) hasilnya sebagai berikut:

- 1) Pengujian kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 2,387 nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,99714 dan nilai signifikan 0,020 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H1 yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah **terdukung**.
- 2) Pengujian pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,908 nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel 1,99714 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H2 yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah **terdukung**.
- 3) Pengujian sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,240 nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel 1,99714 dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H3 yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah **terdukung**.
- 4) Pemanfaatan E-SBN ritel online terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 1,810 nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel 1,99714 dan nilai signifikansi 0,075 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H4 yang menyatakan bahwa pemanfaatan E-SBN ritel online tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah **tidak terdukung**.

## Koefisien Determinasi

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 <sup>a</sup>	.701	.683	2.350

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan E-SBN Ritel Online, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.16 tersebut koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,683 atau 68,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan E-SBN ritel online sedangkan sisanya 31,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pemanfaatan E-SBN ritel online tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan E-SBN ritel online sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, andal, dan berkualitas dan yang awalnya mendapat predikat B untuk kedepannya dapat meraih predikat “A” dalam evaluasi akuntabilitas kinerjanya.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Pengumpulan data tidak hanya dengan kuesioner perlu ditambahkan dengan metode wawancara.

## REFERENSI

- Agustin, K. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Retrieved From [Http://www.albayan.ae](http://www.albayan.ae)
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok (Studi Pada Skpd Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*.
- Damayanti, S. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang ). *Skripsi*.
- Dupe, A. E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten). *Skripsi*.
- Erawati, T., & Yafandi, Y. M. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2), 1–8.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin. *Jom Fekon*, 4(1), 1122–1136.
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *E-Jra Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(02), 91–103. <https://doi.org/10.1186/1476-4598-10-45>
- Harahap, F. Z. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat. *Skripsi*.
- Hartanto, A. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Skripsi*. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Laksana, A. P., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 378–386. <https://doi.org/10.2252-6765>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. (Andi, Ed.). Yogyakarta.
- Nurlaili, A. (2016). Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Pada Satuan

- Kerja Perangkat Daerah ( Skpd ) Kabupaten Jember ) Effect Of Utilization Of Information Technology And Internal Control System Of The Performance Of Government Agencies ( Study O, 1–6.
- Putra, B. A. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom Fekon*, 3(1).
- Putri, R. A. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 2820–2834.
- Risda. (2019). Pengaruh Penerapan Pp No 71 Tahun 2010, Pemanfaatan E-Sbn Ritel Online, Dan Good Governance (Gg) Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan.
- Sardi, S. J., Rifa'i, H. A., & Husna, L. H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah Iii Denpasar-Bali). *Jurnal Infestasi*, 12(1), 1–19.
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jo*, 4(1), 251–264.
- Silalahi, E. B. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*, 1–137.
- Suhaesti, S. R. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom Fekon*, 3(1), 705–719.
- Wahid, I. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *Jom Fekon*, 3(1), 2457–2471.
- Wulandari, F. O. (2018). ( Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar ), 19.
- Zakiyudin, M. A., & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Ri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan Jrap*, 2(1), 89–96.